

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Tanggal 17 Agustus 1945 adalah peristiwa cemerlang bangsa Indonesia yang tidak pernah terlupakan selamanya. Perjuangan dari suatu negara yang hampir empat abad dalam lumpur penjajahan. Kemerdekaan yang semula seperti impian akhirnya menjadi kenyataan. Tanggal 17 Agustus 1945 adalah merupakan perebutan kembali hak asasi bangsa Indonesia dari tangan penjajah Belanda.

Tetapi sejarah perjuangan bergolak kembali setelah kedatangan Belanda dengan membonceng Sekutu. Seluruh rakyat berjuang kembali untuk mempertahankan perjuangan kemerdekaan yang telah dicapainya dengan susah payah.

Sementara itu kabinet yang silih berganti muncul untuk memimpin jalannya pemerintahan RI tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Di bawah kabinet Syahrir yang ke-3 mulai terjadi sengketa-sengketa politik yang memecah jiwa perjuangan bangsa. Syahrir yang memilih politik diplomasi dan kompromi dengan pihak Belanda kemudian melahirkan persetujuan Linggajati. Agresi I Belanda menandai gagalnya persetujuan tersebut, demikian juga dengan persetujuan Renville, yang ditandai pula dengan agresi II karena kegagalannya.

Sementara itu politik diplomasi berjalan terus. Belanda dengan segala kelicikannya berusaha memperlemah kekuatan RI. Sambil berunding Belanda terus mencari akal untuk memperlemah potensi RI baik di bidang politik, militer atau ekonomi, terutama di kota-kota besar dan tempat-tempat yang strategis seperti pelabuhan di mana terdapat modal-modal mereka tanam. Belanda selalu menggunakan politik diplomasi untuk menciptakan ruang dan waktu untuk menyusun kekuatan dan kemudian memberikan pukulan terakhir untuk menghancurkan RI.

Kemudian bagaimana kerja para diplomat kita dalam perundingan dengan Belanda. Untuk menjawab itu semua maka penulis mengajukan beberapa permasalahan, yaitu pertama,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bagaimanakah situasi politik RI sebelum Renville, berbagai cara ditempuh untuk menyelesaikan pertikaian Belanda Indonesia, antara lain dihasilkannya Persetujuan Linggajati, tetapi menemui kegagalan oleh karena Belanda meneruskan ambisinya untuk menguasai RI dengan agresinya ke wilayah RI. Blokadenya yang ketat di segala bidang semakin menekan RI. Masalah kedua, bagaimana proses terbentuknya Persetujuan Renville dan kesulitan apa yang muncul setelah penandatanganannya. Australia dan India besar peranannya terhadap penyelesaian politik di Indonesia. Kedua negara tersebut yang membawa permasalahan Indonesia ke PBB di mana PBB kemudian mengirimkan KTN yang diwakili Australia, Belgia dan Amerika. Akhirnya tanggal 17 dan 19 Januari 1948 Persetujuan Renville diratifikasi di kapal Renville yang masing-masing diwakili oleh Amir Syarifudin dari Indonesia dan Abdulkadir Widjojoatmodjo dari delegasi Belanda. Masalah ketiga, bagaimana realisasi persetujuan Renville oleh kedua belah pihak yang bertikai. Garis demarkasi van Mook yang terpaksa diterima oleh RI banyak menimbulkan kesulitan di pihak RI. Pelanggaran gencatan senjata dan pelaksanaan plebisit yang belum saatnya menambah keruhnya pelaksanaan persetujuan Renville. Masalah keempat, apa akibat yang ditimbulkan oleh persetujuan Renville, ditandatanganinya persetujuan Renville menimbulkan krisis partai, pertentangan antar partai semakin meningkat. PKI meningkatkan oposisinya terhadap pemerintah dan kemudian terjadilah Madiun affair yang semakin menyengsarakan rakyat dan melemahkan perjuangan dalam melawan kolonialis Belanda. Puncak kegagalan Renville ditandai dengan agresi II oleh Belanda atas ibukota RI, Yogyakarta.

Untuk menjawab permasalahan itu semua di sini penulis menggunakan metode penelitian data sekunder. Dengan kata lain penulis memperoleh data dari perpustakaan kemudian mengolahnya dengan menggunakan metode seperti tersebut di atas. Dengan begitu, diharapkan akan didapat suatu pengertian yang mendalam tentang permasalahan di atas.